**BAB I I**

12

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Sebagai awal pembahasan tentang efektivitas peran komite sekolah, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasar hasil beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, maka persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.**

**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

**dengan Penelitian yang Akan Dilakukan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama, tahun dan Judul Penelitian** | **Perumusan Masalah** | **Hasil Penelitian** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| *Dwi Sukiswati; (2008); Peran Komite Sekolah dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Manajemen Sekolah di SMA Negeri 6 Sukoharjo Jawa Tengah* | 1. Bagaimana peran komite sekolah ?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan manajemen sekolah ?
 | Hasil penelitian yang didapat bahwa komite sekolah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah dilaksanakan dengan baik dan peran komite sekolah dalam pengelolaan manajemen sekolah sudah dikatakan cukup efektif.  | Meneliti tentang peran komite sekolah | Disamping lokasi dan situasi sekolah juga waktu penelitian yang akan dilakukan tidak meneliti tentang efektivitas pengelolaan manajemen sekolah |
| *Supriyono (2010) Pelaksanaan Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Muhammadiyah I Kabupaten Sidoarjo* | 1. Bagaimana pelaksanaan peran tugas komite sekolah ?
2. Bagaimana pengelolaan pendidikan ?
 | 1. Komite sekolah selalu berperan dalam segala bidang dan kegiatan, adanya komite sekolah, sekolah merasa sangat terbantu dari berbagai elemen dan sumber serta ditambah lagi adanya ikwam sehingga terevaluasi.
2. Peran komite sekolah meliputi empat bidang, yaitu : bidang pendukung, bidang pertimbang, bidang penghubung, dan bidang pengontrolan.
 | Meneliti tentang pelaksanaan tugas komite sekolah | Disamping lokasi dan situasi sekolah penelitian yang akan dilakukan tidak meneliti tentang pengelolaan pendidikan |

Sumber : Hasil Penelitian Terdahulu

* 1. **Landasan Teori**
		1. **Teori Organisasi**
			1. **Pengertian Organisasi**

Organisasi adalah system kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Organisasi adalah merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan. (Robbins, 2006)

Pengertian tempat di sini dalam arti yang konkrit, tetapi dalam arti yang abstrak, sehingga dengan demikian tempat sini adalah dalam arti fungsi yaitu menampung atau mewadai keinginan kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebelum mengetahui tujuan atau alasan mengapa organisasi itu ada, sebaiknya kita memahami apa pengertian dari organisasi tersebut.dari sumber terpercaya terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan kata lain, (semakin banyak orang yang mengartikannya maka semakin banyak definisi dan semakin luas pula kata itu diartikan). Tapi dari sekian banyak definisi “organisasi”, Organisasi juga bisa dikatakan sekumpulan individu, kelompok yang mempunyai tujuan, visi dan misi tertentu untuk menampung/ menyalurkan pikiran atau pendapat yang tidak sama (dengan kata lain berbeda).

Salah satu bagian penting tugas pengorganisasian adalah mengharrmonisasikan kelompok orang yang berbada, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan-kepampuan kesemuanya kesuatu arah tertentu. (Terry, 2003)

Ciri-ciri organisasi yaitu :

1. Adanya komponen (atasan dan bawahan)
2. Adanya kerja sama (*cooperative* yang berstruktur dari sekelompok orang)
3. Adanya tujuan
4. Adanya sasaran
5. Adanya keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati
6. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas
	* + 1. **Unsur-Unsur Organisasi**

Menurut Davis (2002) ada tiga unsur penting partisipasi dalam organisasi , sebagai berikut :

1. Unsur pertama, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai anggota artinya ada rasa “*sense of belongingness*.

Davis (2002) juga mengemukakan jenis-jenis yang ada dalam organisasi, antara lain :

1. Pikiran
2. Tenaga
3. Pikiran dan Tenaga
4. Keahlian
5. Barang
6. Uang

        Agar suatu partisipasi dalam organisasi dapat berjalan dengan efektif, membutuhkan persyaratan-persyaratan yang mutlak yaitu sebagai berikut ini :

1. Waktu. Untuk dapat berpatisipasi diperlukan waktu. Waktu yang dimaksudkan disini adalah untuk memahamai pesan yang disampaikan oleh pemimpin. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta
2. Bilamana dalam kegiatan partisipasi ini diperlukan dana perangsang, hendaknya dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan “memanjakan”, yang akan menimbulkan efek negative
3. Subyek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatau yang menjadi perhatiannnya
4. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, dalam arti kata yang bersangkutan memiliki luas lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator, dan kalupun belum ada, maka unsur-unsur itu ditumbuhkan oleh komunikator
5. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran yang efektif atau berhasil
6. Para pihak yang bersangkutan bebas di dlam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
7. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan kepada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan kepada prisnsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif.

Berikut Jenis-jenis Organsasi yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi Formal meliputi
2. Organisasi Olahraga
3. Organisasi Sekolah
4. Organisasi Negara
5. Organisasi Informal Meliputi
6. Organisasi Politik
7. Organisasi Sosial
8. Organisasi Mahasiswa
	* + 1. **Tujuan Adanya Organisasi**

Tanpa adanya organisasi kita akan menjadi kesulitan untuk melaksanakan suatu kerja sama, karena setiap orang tidak akan mengetahui bagaimana cara bekerja sama dalam sebuah organisasi tersebut. Suatu organisasi dibentuk karena adanya suatu dorongan dari dalam diri sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu organisasi yang berjalan tanpa tujuan adalah sama halnya dengan ular berjalan tanpa kepala, suatu organisasi berjalan dengan baik karena didukung oleh tujuan yang jelas. Tujuan merupakan sebuah rel yang mengarakan kita ke satu arah yang tepat sesuai dengan harapan kita.

Dengan mengikuti organisasi, seseorang  dapat mengaktualisasikan dirinya. Selain itu, seseorang juga akan memiliki kemampuan lebih di bandingkan dengan mereka yang tidak pernah ikut organisasi dan . Selain itu, dalam organisasi juga bisa melatih soft skill seseorang.

Orang cenderung ikut serta dalam kegiatan organisasi dikarenakan dalam organisasi, seseorang bisa mendapatkan ilmu yang mungkin tidak didapatkannya selama bangku pendidikan. Seperti mengatur jalannya kegiatan, mengenal karakter orang-perorang, mengatur waktu dengan baik, mengasah softskill, membentuk jiwa kepemimpinan, mengatur cara berkomunikasi yang baik. Dan masih banyak lagi. Selain itu, dengan mengikuti organisasi juga bisa memperluas jaring pertemanan. Organisasi mampu membangun karakter diri yang matang dalam berpikir, pandai dalam bersosialisai, kritis dalam menyikapi permasalahan dan melatih kebersamaan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Orang yang berhasil di organisasi kelak tak canggung lagi berbicara di depan umum.

Didunia ini, tak ada satu pun orang yang sukses tanpa pernah mengikuti sebuah organisasi. Organisasi apapun itu. Jadi, organisasi memiliki peranan yang sangat penting untuk keberhasilan seseorang di masa yang akan datang. Orang yang sukses ialah orang yang berhasil dalam kegiatan organisasinya.

* + 1. **Komite Sekolah**
			1. **Pengertian Komite Sekolah**

Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dijabarkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002. Sebagai acuan dapat digunakan Lampiran II Kepmendiknas No. 033/U/2002 tersebut.

Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003).

Peran Komite Sekolah. Berdasarkan prinsip desentralisasi pendidikan, sekolah mendapat kewenangan untuk menyusun program yang akan diterapkan. Disamping itu sekolah juga memperoleh kewenangan untuk mengelola segala sarana dan prasarana yang tersedia, mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, serta melibatkan kepedulian stakeholders dalam pelaksanaan pendidikan.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Depdiknas, 2002:17).

Komite sekolah merupakan suatu lembaga nonprofit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan proses dan hasil pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah manapun lembaga pemerintah lainnya.

Komite sekolah dan memiliki kemandirian masing-masing tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003 : 24) pada pasal 36 ayat 3 ditegaskan bahwa :

Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satu sekolah.

Komite sekolah merupakan suatu wadah yang memiliki fungsi dan peran untuk menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu partisipasi komite sekolah dapat dikatakan sebagai suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota dan kepengurusannya, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan/pengevaluasian pendidikan demi kemajuan mutu sekolah

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat (Suryadi, 2003). Komite sekolah merupakan mitra sekolah dalam upaya membangun komitmen dan loyalitas serta kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas sekolah. Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut :

1. Mewakili dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Keberadaan komite sekolah senantiasa bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai dengan posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebabai berikut :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berjuwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Mulyasa, 2003 : 189)

Untuk menjalankan perannya itu, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang ditujukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
	1. Kebijakan dan program pendidikan;
	2. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah;
	3. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
	4. Kriteria tenaga kependidikan;
	5. Kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Mulyasa, 2003 : 190)

Peran komite di sekolah cukup besar, utamanya dalam mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan yang pendanaannya tidak terakomodir dalam anggaran rutin sekolah, seperti membayar honor kelebihan jam mengajar, pengawas ulangan umum, honor wali-wali kelas, honor kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dan lain-lain.

Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite sekolah bukan berasal dari kepala sekolah.

Pengurus komite sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah.
2. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah
3. Jika diperlukan pengurus komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya (Depdiknas, 2002 : 25).

Adapun keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Disamping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat juga dilibatkan sebagai anggota. Anggota komite sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut :

1. Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis.
2. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat).
3. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan.
4. Pejabat pemerintah setempat seperti, Lurah, Camat, Kepolisian dan sebagainya.
5. Dunia industri atau dunia usaha.
6. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan.
7. Organisasi profesi tenaga kependidikan.
8. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas, dan perwakilan forum alumni (SD/SLP/SLA) yang telah dewasa dan mandiri. (Diknas, 2009)
	* + 1. **Kedudukan, Sifat dan Tujuan Komite Sekolah**
		1. **Kedudukan**

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. Ada sekolah tunggal dan ada sekolah yang berada dalam satu kompleks. Ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, maka Komite Sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut :

*Pertama*, Komite Sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan. Satuan pendidikan sekolah yang siswanya dalam jumlah yang banyak, atau sekolah khusus seperti Sekolah Luar Biasa, temasuk dalam ketegori yang dapat membentuk Komite Sekolah sendiri.

*Kedua,* Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis. Sebagai misal, beberapa SD yang terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu Komite Sekolah.

*Ketiga*, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan*.* Sebagai misal, ada satu kompleks pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan TK, SD, SLB, dan SMU, dan bahkan SMK dapat membentuk satu Komite Sekolah.

*Keempat*, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuanpendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam pembinaan satu yayasan penyelenggara pendidikan, misalnya sekolah-sekolah di bawah lembaga pendidikan Muhammadiyah, Al Azhar, Al Izhar, Sekolah Katholik, Sekolah Kristen, dsb.

* + 1. **Sifat**

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).

* + 1. **Tujuan**

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan *(power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut.

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
	* + 1. **Peran dan Fungsi Komite Sekolah**
4. **Peran**

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut.

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
5. **Fungsi**

Untuk menjalankan perannya itu, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
	1. Kebijakan dan program pendidikan;
	2. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau RKAS
	3. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
	4. Kriteria tenaga kependidikan;
	5. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
	6. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut.

* 1. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
	2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

		+ 1. **Organisasi Komite Sekolah**
1. **Keanggotaan Komite Sekolah**

Dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002, keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat yang berasal dari :

1. Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis.
2. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat).
3. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4. Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain).
5. Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
6. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
7. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
8. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas.
9. Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.

Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak- banyaknya berjumlah tiga orang. Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART. (Mulyasa, 2003)

1. **Kepengurusan Komite Sekolah**

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi Komite Sekolah dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat Komite Sekolah.

Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

1. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah.
2. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.
3. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya. (Diknas, 2009)

Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Pengurus komite Sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
2. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
3. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
4. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah. (Arief Rachmad, 2008)
5. **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

Komite Sekolah wajib memiliki AD/ART. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan.
2. Dasar, tujuan, dan kegiatan.
3. Keanggotaan dan kepengurusan.
4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus.
5. Keuangan.
6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat.
7. Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat:

1. Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus Komite Sekolah.
2. Rincian tugas Komite Sekolah.
3. Mekanisme rapat.
4. Kerja sama dengan pihak lain.
5. Ketentuan penutup.
	* + 1. **Pembentukan Komite Sekolah**
	1. **Prinsip Pembentukan**

Pembentukan Komite Sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

* 1. **Mekanisme Pembentukan**

Pembentukan komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut keputusan ini.
2. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
3. Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
4. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
5. Menyusun nama-nama anggota terpilih;
6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;
7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala satuan pendidikan.
8. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk. (Diknas, 2009)
	1. **Penetapan Pembentukan Komite Sekolah**

Calon anggota Komite Sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur. Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.

Pengurus dan anggota komite terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, Komite Sekolah dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat. Misalnya Komite Sekolah untuk SD dan SLTP dikukuhkan oleh Camat dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan; SMU/SMK dikukuhkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.

* + - 1. **Tata Kerja Organisasi Komite Sekolah**

Penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah sesuai dengan jenjang dan jenis, baik negeri maupun swasta, telah diatur melalui perundang-undangan serta perangkat peraturan yang mengikutinya. Selain itu setiap penyelenggaraan persekolahan dibina oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, kondisi tersebut berimplikasi terhadap tatanan dan hubungan baik vertikal maupun horizontal yang baku antara sekolah dengan instansi lain. Hubungan-hubungan tersebut bisa berupa laporan, konsultasi, koordinasi, pelayanan, dan kemitraan.

Melalui Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Nasional, pemerintah memberikan wadah bagi masyarakat untuk berperan serta dan menyalurkan aspirasinya dalam menunjang pendidikan melalui Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten dan Komite Sekolah pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan (sekolah). Dengan adanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tingkat kepedulian dan peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah mewujudkan pendidikan yang bermutu diharapkan akan lebih baik dan meningkat untuk mewujudkan *community – based education*.

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan komite-komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

Keberadaan komite sekolah diharapkan mampu membantu penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), karena tujuan dibentuknya adalah mewadai masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah, meningkatkan transparasi, akuntabilitas dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, komite sekolah di lengkapi dengan perangkat peran, yaitu :

* 1. Memberi pertimbangan (*advisory agency*), yaknimemberikan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
	2. Pendukung (*supporting*), yakni memberikan dukungan baik yang berwujud financial, pikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan.
	3. Mengontrol (*controlling*), yakni mengontrol kinerja sekolah dalam rangkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran (*output*) pendidikan di suatu pendidikan.
	4. Mediator, yakni penghubung antara sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan eksekutirf dan legislative. Dengan perangkat peran yang melekat adanya, komite sekolah (sebagai representasi *stakeholder*) memiliki *political will* dalam ikut menentukan arah pendidikan. (Balitbang Depdiknas, 2010)

Berdasar Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang komite sekolah, maka dapat di ketahui tentang indikator-indikator pengukuran kinerja komite sekolah. Beberapa indikator pengukuran kinerja sekolah tersebut mencakup beberapa hal, yaitu :

**Tabel 2.2**

**Indikator Kerja Komite Sekolah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bidang** | **Indikator** | **Sub Indikator** |
| Bidang Pertimbangan | * 1. Perencanaan Sekolah
 | * 1. Identifikasi sumber daya pendidikan dalam sekolah
	2. Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS
	3. Menyelenggarakan Rapat RAPBS (Sekolah, Orang Tua, Siswa, Masyarakat)
	4. Ikut mengesahkan RAPBS bersama Kepala Sekolah
 |
| * 1. Pelaksanaan Program
 | 1. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah yang berhubungan dengan kurikulum
2. Memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan PMB
3. Memberikan masukan dan pertimbangan sehubungan dengan proses penelitian
 |
| * 1. Pengelolaan Sumber Daya
 | 1. Memberikan masukan dan pertimbangan sehubungan dengan pengelolaan serta pengembangan SDM
2. Memberikan masukan serta pertimbangan sehubungan dengan pengelolaan sarana dan prasarana
3. Memberikan masukan dan pertimbangan sehubungan dengan pengelolaan yang berhubungan dengan anggaran sekolah
 |
| Bidang Pendukungan | * 1. Pengelolaan Sumber Daya
 | 1. Membantu kondisi ketenagaan
2. Mobilitas guru sukarelawan
3. Mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana
 |
| * 1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 | 1. Memobilitasi bantuan sarana dan prasarana
2. Mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana
3. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana
 |
| * 1. Pengelolaan Anggaran
 | 1. Membantu kondisi anggaran
2. Memobilitasi dukungan terhadap anggaran pendidikan
3. Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan
4. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran
 |
| Bidang Pengontrolan | 1. Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah
 | 1. Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah
2. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah
3. Pengawasan terhadap kualitas program sekolah
 |
| 1. Membantu pelaksanaan program sekolah
 | 1. Memantau penjadwalan program sekolah
2. Memantau alokasi anggaran
3. Memantau sumber daya pelaksanaan
4. Memantau partisipasi stakeholder
 |
| 1. Memantau output Pendidikan
 | 1. Memantau hasil uji akhir
2. Memantau angka partisipasi sekolah
3. Memantau angka mengulang sekolah
4. Memantau angka bertahan sekolah
 |
| Bidang Penghubungan / Mediator | 1. Perencanaan
 | 1. Menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, komite sekolah dengan dewan pendidikan
2. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan
3. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala sekolah
 |
| 1. Pelaksanaan Program
 | 1. Mensosialisasi kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat
2. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah
3. Mengkonsumsikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah
 |
| 1. Pengelolaan sumber daya pendidikan
 | 1. Mengidentifikasi kondisi sumber daya sekolah
2. Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat
3. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah
4. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat
 |

Sumber : Bag. Projek Publikasi & Sosialisasi Pendidikan Dirjen Depdiknas, Jakarta 2003.

* + 1. **Kualitas Pendidikan**
			1. **Pengertian Kualitas Pendidikan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan *ilmu pengetahuan* dan *teknologi*. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan *kualitas pendidikan* merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha *pembangunan pendidikan* yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kuailtas pendidikan. Salah satu indikator kekurang berhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil. (Balitbang Depdiknas, 2010)

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented.* Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented,* diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa komleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Diskusi tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan..Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (*school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement*). Disamping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan, hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya.

Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya *benchmarking*). Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (*School Based Quality Management*) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan (*developmental*) disebut *School Based Quality Improvement.* (Mulyasa, 2003)

Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing - masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melaui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing.

Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan (*framework*) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan.

Strategi ini berbeda dengan konsep mengenai pengelolaan sekolah yang selama ini kita kenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan atau pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro saja tetapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro; Sementara sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, lingkungan Sekolah, dan harapan orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama seringkali menimbulkan kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di dalam proses peningkatan mutu pendidikan.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori *effective school* yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979). Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut :

* + 1. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib,
		2. Sekolah memilki misi dan target mutu yang ingin dicapai,
		3. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat,
		4. Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi,
		5. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK,
		6. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan / perbaikan mutu, dan
		7. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat. (Dalam Rachmad, 2008)

Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah; kepala sekolah, guru dan tenaga/staf administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat.

Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. Ada empat hal yang terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total yaitu :

* + 1. Perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus mengumandangkan peningkatan mutu,
		2. Kualitas/mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah,
		3. Prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan,
		4. Sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arief bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional. (Tilaar, 2009)

Sistem kompetisi tersebut akan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan akan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personel sekolah, khususnya siswa. Jadi sekolah harus mengontrol semua semberdaya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal - hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu khususnya.

* + - 1. **Perkembangan Kualitas Pendidikan**

Dalam bukunya, Tilaar (2009) bahwa perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia telah berlangsung dalam empat era yaitu : 1). Era kolonial, 2). Era Orde Lama, 3). Era Orde Baru. 4). Era Reformasi. Secara jelas perkembangan kualitas menurut Tilaar adalah :

1. **Era Kolonial**

Pada jaman kolonial pendidikan hanya diberikan kepada para penguasa serta kaum feodal. Pendidikan rakyat cukup diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar penguasa kolonial. Pendidikan diberikan hanya terbatas kepada rakyat di sekolah-sekolah kelas 2 atau ongko loro tidak diragukan mutunya. Sungguhpun standar yang dipakai untuk mengukur kualitas rakyat pada waktu itu diragukan karena sebagian besar rakyat tidak memperoleh pendidikan, namun demikian apa yang diperoleh pendidikan seperti pendidikan rakyat 3 tahun, pendidikan rakyat 5 tahun, telah menghasilkan pemimpin masyarakat bahkan menghasilkan pemimpin-pemimpin gerakan nasional.

Pendidikan kolonial untuk golongan bangsawan serta penguasa tidak diragukan lagi mutunya. Para pemimpin nasional kita kebanyakan memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah kolonial bahkan beberapa mahasiswa yang dapat melanjutkan di Universitas terkenal di Eropa. Dalam sejarah pendidikan kita dapat katakana bahwa intelegensi bangsa Indonesia tidak kalah dengan kaum penjajah. Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada waktu itu adalah kekurangan kesempatan yang sama yang diberikan kepada semua anak bangsa. Oleh sebab itu di dalam Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah akan menyusun suatu sistem pendidikaan nasional untuk rakyat, untuk semua bangsa.

1. **Era Orde Lama**

Masa revolusi pendidikan nasional mulai meletakkan dasar-dasarnya. Pada masa revolusi sangat terasa serba terbatas, tetapi bangsa kita dapat melaksanakan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kita dapat merumuskan Undang Undang Pendidikan No. 4/1950 junto no. 12/ 1954. Kita dapat membangun sistem pendidikan yang tidak kalah mutunya. Para pengajar, pelajar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya walaupun serba terbatas. Dengan segala keterbatasan itu memupuk pemimpin-pemimpin nasional yang dapat mengatasi masa pancaroba seperti rongrongan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sayang sekali pada akhir era ini pendidikan kemudian dimasuki oleh politik praktis atau mulai dijadikan kendaraan politik. Pada masa itu dimulai pendidikan indoktrinasi yaitu menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan Orde Lama.

Pada Orde Lama sudah mulai diadakan ujian-ujian negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang serba ketat tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas. Hal ini didukung karena jumlah sekolah belum begitu banyak dan guru-guru yang ditempa pada zaman kolonial. Pada zaman itu siswa dan guru dituntut disiplin tinggi. Guru belum berorientasi kepada yang material tetapi kepada yang ideal. Citra guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang diciptakaan era Orde Baru sebenarnya telah dikembangkan pada Orde Lama.

Kebijakan yang diambil pada Orde Lama dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas di setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pada waktu itu pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di Pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR, sedangkan di provinsi-provinsi karena kurangnya persiapan dosen dan keterbatasaan sarana dan prasarana mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan tinggi mulai terjadi.

1. **Era Orde Baru**

Dalam era ini dikenal sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya INPRES Pendidikan Dasar. Tetapi sayang sekali INPRES Pendidikan Dasar belum ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas tetapi baru kuantitas. Selain itu sistem ujian negara (EBTANAS) telah berubah menjadi bumerang yaitu penentuan kelulusan siswa menurut rumus-rumus tertentu. Akhirnya di tiap-tiap lembaga pendidikan sekolah berusaha untuk meluluskan siswanya 100%. Hal ini berakibat pada suatu pembohongan publik dan dirinya sendiri dalam masyarakat. Oleh sebab itu era Orde Baru pendidikan telah dijadikan sebagai indikator palsu mengenai keberhasilan pemerintah dalam pembangunan.

Dari hasil manipulasi ujian nasional sekolah dasar kemudian meningkat ke sekolah menengah dan kemudian meningkat ke sekolah menengah tingkat atas dan selanjutnya berpengaruh pada mutu pendidikan tinggi. Walaupun pada waktu itu pendidikan tinggi memiliki otonomi dengan mengadakan ujian masuk melalui UMPTN, tetapi hal tersebut tidak menolong. Pada akhirnya hasil EBTANAS juga dijadikan indikator penerimaan di perguruan tinggi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi maka pendidikan tinggi negeri mulai mengadakan penelusuran minat dari para siswa SMA yang berpotensi. Cara tersebut kemudian diikuti oleh pendidikan tinggi lainnya.

1. **Era Reformasi**

Indonesia sejak tahun 1998 merupakan era transisi dengan tumbuhnya proses demokrasi. Demokrasi juga telah memasuki dunia pendidikan nasional antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hanya beberapa fungsi saja yang tetap berada di tangan pemerintah pusat. Perubahan dari sistem yang sentralisasi ke desentralisasi akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang jauh di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Selain perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang membawa banyak perubahan juga bagaimana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan bebas abad ke-21. Kebutuhan ini ditampung dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta pentingnya tenaga guru dan dosen sebagai ujung tombak dari reformasi pendidikan nasional.

Sistem Pendidikan Nasional Era Reformasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 diuraikan dalam indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalannya, maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dijelaskan dalam Permendiknas RI.

* + 1. **Indikator Keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan**

Untuk mengetahui apakah peningkatan mutu pendidikan ini telah diterapkan dengan baik dan benar, diperlukan suatu indikator dan ukuran ketercapaian minimal sesuai dengan komponen yang ada di dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Indikator keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan tersebut dibawah ini dikutip dari Pedoman Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten tempat penulis mengadakan penelitian yaitu di Kabupaten Sampang. Sehingga tidak menutup kemungkinan pedoman tersebut terdapat perbedaan di lain tempat / daerah di luar Kabupaten Sampang, karena seperti telah dijelaskan diatas bahwa Peningkatan Mutu Pendidikan dibuat didasarkan pada kondisi potensi di masing-masing daerah Kota / Kabupaten. Indikator keberhasilan tersebut secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**

**Indikator Keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen SPM** | **Indikator** | **Ketercapaian Minimal** | **Kewenangan** |
| **P** | **PR** | **K** | **S** |
| 1. | Kurikulum  | 1. Ketersedian kurikulum nasional
2. Tersebarnya kurikulum lokal
3. Keterlaksanaan kurikulum nasional
4. Keterlaksanaan kurikulum lokal
5. Prosentase daya serap kurikulum nasional
6. Prosentase daya serap kurikulum lokal
 |  |  |  |  |  |
| 2. | Anak Didik | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
2. Angka Partisipasi Murni APM)
3. Angka Pendaftaran Siswa Baru
4. Angka Putus Sekolah (APS)
5. Angka Mengulang (AMK)
6. Survival Rate
7. Prosentase Kelulusan
 |  |  |  |  |  |
| 3.  | Ketenagaan | 1. Kinerja Kepala Sekolah
2. Prosentase Guru Berkualifikasi
3. Prosentase Guru Berkeahlian
4. Rasio Guru dengan Siswa
 |  |  |  |  |  |
| 4.  | Sarana dan Prasarana | 1. Lahan
2. Bangunan
3. Peralatan/Lab/Media
4. Buku teks:Siswa
5. Sarana Olahraga
 |  |  |  |  |  |
| 5.  | Organisasi | 1. Struktur
2. Personalia
3. Uraian Olahraga
 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pembiayaan | 1. Anggaran Pemerintah
2. Anggaran Swadaya
 |  |  |  |  |  |

Lanjutan Tabel 2.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen SPM** | **Indikator** | **Ketercapaian Minimal** | **Kewenangan** |
| **P** | **PR** | **K** | **S** |
| 7. | Manajemen Sekolah | 1. Tingkat kehadiran guru
2. Tingkat kehadiran tenaga administrasi
3. Tingkat kehadiran tenaga kependidikan lainnya
4. Tingkat kehadiran siswa
5. Tertib administrasi
6. Kinerja Sekolah
 |  |  |  |  |  |
| 8. | Peran serta Masyarakat | 1. Dukungan Komite Sekolah, Badan Peran serta Masyarakat
2. Perhatian Orangtua
3. Peran serta tokoh Masyarakat
4. Peran serta Dunia Usaha
 |  |  |  |  |  |

Keterangan :

P : Pemerintah Pusat

PR : Pemerintah Propinsi

K : Pemerintah Kabupaten/Kota

S : Sekolah

* 1. **Kerangka Pikir Penelitian**

Peran serta masyarakat merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diwujudkan dalam wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Agar peran serta masyarakat tersebut dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan maka dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu diberdayakan untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Secara kualitatif, keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah memang belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Salah satu penyebabnya antara lain karena masih rendahnya pemaham masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan tentang kedudukan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Anonim, 2003).

Secara sistematis kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Kepmendiknas No. 044/U/2002**

**Kualitas Pendidikan**

**Kendala-kendala**

**Peran Komite Sekolah**

1. Bidang Pertimbangan;
2. Bidang Pendukung,
3. Bidang Pengontrolan,

**Gambar 2.1**

**Model Kerangka Pikir Penelitian**